

PENGADILAN AGAMA KUDUS

LAPORAN KEUANGAN DIPA 01

Semester II Tahun 2023

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam

Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385

e-mail : infopakudus@yahoo.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Kudus - Pati KM 04 Kab. Kudus

Telp./Fax. 0291-438 385

Kudus - Jawa Tengah 59321

e-mail : keuanganpakudus@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

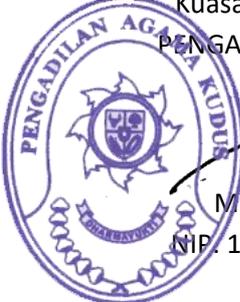
Pengadilan Agama Kudus adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kudus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kudus, 29 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
PENGADILAN AGAMA KUDUS



Moh. Asfaroni, S.H.I
NIP. 197806182003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	x
NERACA	xi
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	15
B.3 Belanja Barang.....	16
B.4 Belanja Modal.....	16
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	17
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	18

B.4.4 Belanja Modal Lainnya	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	19
C.2 Persediaan.....	20
C.3 Tanah.....	20
C.4 Peralatan dan Mesin.....	22
C.5 Gedung dan Bangunan.....	23
C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan	23
C.7 Aset Tetap Lainnya	23
C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	24
C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	24
C.10 Aset Tak Berwujud.....	25
C.11 Aset Lain–Lain	26
C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	27
C.13 Utang kepada Pihak Ketiga	27
C.14 Uang Muka dari KPPN	28
C.15 Ekuitas	28
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	28
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
D.2 Beban Pegawai	29
D.3 Beban Persediaan	30
D.4 Beban Barang dan Jasa	30
D.5. Beban Pemeliharaan	31
D.6 Beban Perjalanan Dinas	31
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	32
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	33

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	33
E.1 Ekuitas Awal	33
E.2 Defisit LO.....	33
E.3 Koreksi Nilai Persediaan	33
E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	33
E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	33
E.6 Koreksi Lain-lain	33
E.7 Transaksi Antar Entitas.....	34
E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	34
E.7.2 Transfer keluar	34
E.8 Ekuitas Akhir	35
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	35
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	35
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	35

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2023 dan TA 2022.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Des 2023</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2023 dan TA 2022</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Des 2023 dan 31 Des 2022</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 13. Rincian Persediaan.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 31 Des 2023</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Des 2023 dan 31 Des 2022</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Des 2023 dan 31 Des 2022.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Des 2023 dan 31 Des 2022</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Des 2023 dan 31 Des 2022</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Des 2023 dan 31 Des 2022</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Des 2023 dan 31 Des 2022</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan & Amortisasi 31 Des 2023 dan 31 Des 2022 ..</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Des 2023 dan 31 Des 2022</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Des 2023 dan 31 Des 2022.....</i>	<i>33</i>

Pengadilan Agama Kudus

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385 e-mail : infopakudus@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester II Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Kudus, 29 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Moh. Astaroni, S.H.I

NIP. 197806182003121002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.14.243.405,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp.1.200.000,00 atau mencapai 99,00 persen. Realisasi Belanja Negara TA 2023 adalah sebesar Rp.4.784.691.156,00 atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.880.823.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.18.384.859.368 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.4.468.900,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.18.380.390.468,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.19.405.779,00 dan Rp.18.365.453.589,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.734.405,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.5.026.495.073,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(5.024.760.668,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.12.509.000,00 dan Rp.0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp.(5.012.251.668,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.18.512.532.506,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp.(5.012.251.668,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.4.865.172.751,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 18.365.453.589,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Pada tanggal 13 April 2023 telah dilakukan Transfer Keluar atas Transfer Masuk BMN ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keterangan Transfer Keluar dari Pengadilan Agama Kudus ke Badan Urusan Administrasi MA RI dengan Nomor W11-A16/861/PL.04/IV/2023. Hal tersebut guna menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2022, dimana terdapat proses transfer keluar dan transfer masuk yang dilakukan pada tahun 2022 namun aset diterima pada tahun 2023. Untuk itu dilakukan koreksi pada satuan kerja dengan cara melakukan Transfer Keluar kepada satker Pengirim pada Periode 14 (ADJ 2) Tahun 2022. Adapun rincian barangnya sebagai berikut :

- a. Scanner (Peralatan Personal Komputer) dengan Kode Barang 3.10.02.03.004 NUP 1 senilai Rp 19.850.000,00
- b. Scanner (Peralatan Personal Komputer) dengan Kode Barang 3.10.02.03.004 NUP 2 senilai Rp 19.850.000,00
- c. Server dengan Kode Barang 3.10.02.04.001 NUP 3 senilai 84.700.000

Setelah Satker Pengirim menerima kembali Transfer Keluar dari Satker maka Satker Pengirim yaitu Badan Urusan Administrasi MA RI melakukan proses TKTM pada Tahun 2023. Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dilakukan pencatatan pada Aplikasi SAKTI tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor : 613/BUA.7/BAST/BMN-SS/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 berupa 2 Unit Scanner (Peralatan Personal Komputer) dengan Kode Barang 3.10.02.03.004 NUP 3 & 4 senilai Rp 19.850.000,00 dengan total Rp 39.700.000,00 dan 1 Unit Server dengan Kode Barang 3.10.02.04.001 NUP 4 senilai Rp 84.700.000 dengan Total Transfer Masuk Alat Pengolah Data tersebut senilai Rp124.400.000,00.

Pada Neraca tanggal 30 Juni 2023 terdapat Akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp 34.881,00 merupakan hasil dari pemotongan gaji Hakim atas Sewa Rumah Dinas untuk satker yang lama, sehingga akun tersebut akan hilang setelah terbit SP2D.

Pada Neraca tanggal 30 September 2023 terdapat Akun Utang Yang Belum Ditagihkan sebesar Rp 3.631.400,00 merupakan akun yang muncul disebabkan adanya transaksi Bendahara, sehingga akun tersebut akan hilang pada bulan berikutnya setelah terbit SP2D.

Pada saat Monitoring To Do List di Aplikasi SAKTI untuk Triwulan III tanggal 30 September 2023 terdapat Selisih Pagu Minus. Berkaitan dengan Revisi yang belum turun, sehingga Pengadilan Agama Kudus tetap melakukan Tutup Permanent Periode September 2023 sesuai dengan Perdirjen PER-8/PB/2023 sebagai syarat terbitnya SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi). Selisih Pagu Minus tersebut diharapkan dapat terselesaikan sebelum akhir tahun 2023.

Pada akhir tahun 2023, 31 Desember 2023 telah terselesaikan untuk Monitoring To Do List di Aplikasi SAKTI mengenai Selisih Pagu Minus dan telah terbit Surat Hasil Rekonsiliasi Akhir Tahun 2023.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023			31 DESEMBER 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	1.200.000,00	14.243.405,00	1187,00	0,00	4.503.303,00	0,00
Jumlah Pendapatan		1.200.000,00	14.243.405,00	1187,00	0,00	4.503.303,00	0,00
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2.	3.797.207.000,00	3.665.127.952,00	97	3.176.207.000,00	3.155.732.423,00	99
2. Belanja Barang	B.3.	1.027.816.000,00	1.027.763.204,00	100	1.067.418.000,00	1.067.207.045,00	100
3. Belanja Modal	B.4.	55.800.000,00	55.800.000,00	100	361.232.000,00	360.657.648,00	100
Jumlah Belanja		4.880.823.000,00	4.748.691.156,00	97	4.604.857.000,00	4.583.597.116,00	99

NERACA

PENGADILAN AGAMA KUDUS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	-	-
Persediaan	C. 3	4.468.900	3.668.800
Jumlah Aset Lancar		4.468.900	3.668.800
Aset Tetap			
Tanah	C. 4	13.325.572.000	13.325.572.000
Peralatan dan Mesin	C. 5	2.774.820.583	2.569.620.583
Gedung dan Bangunan	C. 6	5.215.965.000	5.215.965.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 8	6.527.887	6.527.887
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 9	-	-
Akumulasi Penyusutan		(2.942.495.002)	(2.607.381.256)
Jumlah Aset Tetap		18.380.390.468	18.510.304.214
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 10	0	4.900.000
Aset Lain-lain	C. 11	5.528.800	16.328.800
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 12	(5.528.800)	(21.228.800)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		18.384.859.368	18.513.973.014
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 13	19.205.779	1.240.508
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 14	200.000	0
Pendapatan Diterima di Muka	C. 15	0	200.000
Uang Muka dari KPPN	C. 16	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19.405.779	1.440.508
JUMLAH KEWAJIBAN		19.405.779	1.440.508
EKUITAS			
Ekuitas	C. 15	18.365.453.589	18.512.532.506
JUMLAH EKUITAS		18.365.453.589	18.512.532.506
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.384.859.368	18.513.973.014

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA KUDUS LAPORAN OPERASIONAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		1.734.405	1.200.000
PENDAPATAN HIBAH		0	0
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	1.734.405	1.200.000
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	3.683.069.518	3.156.834.857
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	13.714.700	13.774.100
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	611.083.882	690.879.273
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	329.498.227	298.885.515
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	72.690.000	50.877.600
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	316.438.746	313.395.917
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	D. 8	0	0
JUMLAH BEBAN		5.026.495.073	4.524.647.262
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.024.760.668)	(4.523.447.262)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		12.509.000	3.303.303
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		12.509.000	3.303.303
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		12.509.000	3.303.303
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	(5.012.251.668)	(4.520.143.959)
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(5.012.251.668)	(4.520.143.959)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	18.512.532.506	18.172.567.902
SURPLUS/DEFISIT LO	E. 2	(5.012.251.668)	(4.520.143.959)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 5	-	-
Koreksi Lain-lain	E. 6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 7	4.865.172.751	4.860.108.563
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(147.078.917)	339.964.604
EKUITAS AKHIR	E. 8	18.365.453.589	18.512.532.506

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama Kudus*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2021 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Kudus sebagai Visi dan Misinya

Visi Pengadilan Agama Kudus : Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus Yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Kudus :

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Kudus yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kudus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Kudus menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Kudus dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Urusan Administrasi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.361.232.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban*

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Kudus telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) POK dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Semester II Tahun 2023	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	3.496.207.000	3.797.207.000
Belanja Barang	1.005.816.000	1.027.816.000
Belanja Modal	0	55.800.000
Jumlah Belanja	4.502.023.000	4.880.823.000

B.1 Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

Rp.14.243.405,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 14.243.405,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.200.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember Tahun 2023		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12.509.000	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bngunan	1.200.000	1.734.405	144,53
Jumlah Pendapatan Bruto		1.200.000	14.243.405	1.186,95
Pengembalian		0	0	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		1.200.000	14.243.405	1.186,95

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan Rp.9.740.102,- dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa lelang mobil ST 100 Nopol K 9506 EK sebesar Rp.12.509.000,00 dengan nomor risalah lelang dari KPKNL Nomor 280/37/2023 Tanggal 28 Februari 2023, dengan bukti penerimaan Negara NTB 000000406994, NTPN 53E6A48VV59E2JS8 dan telah mendapatkan Persetujuan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 226/SEK/SK/V/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Alat Angkutan Bermotor pada Pengadilan Agama Kudus. Terdapat Kenaikan pada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp 174.405,00- yang disebabkan adanya Pemotongan Gaji Hakim atas sewa rumah dinas atas satker yang lama. Terdapat Pendapatan atas Sewa Kantin senilai Rp 1.200.000,00 dan Terdapat Koreksi Surat Perjanjian Sewa Kantin pada Pengadilan Agama Kudus yang mengharuskan terdapatnya Klausul Biaya Listrik yang dibebankan bagi pihak penyewa kantin sehingga untuk jangka waktu sewa kantin selama 3 tahun (36 bulan) dikenakan perbulannya sebesar Rp 10.000,00 sehingga terdapat Penerimaan Negara senilai Rp 360.000,00 dengan Bukti Penerimaan Negara NTB 968154357339 dan NTPN E0B767QLUG4TV9EO

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2023 dan TA 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2023 dan TA 2022

Realisasi Belanja
Negara Rp.
3.693.987.738,00.

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA. 2023	TA.2022	Kenaikan(Penurunan)	
				Rp	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.509.000	3.303.303	9.205.697	278,68
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bngunan	1.734.405	1.200.000	534.405	44.53
Jumlah Pendapatan Netto		14.243.405	4.503.303	9.740.102	216,28

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Kudus pada periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.4.748.691.156,00 atau 97 % dari anggaran belanja sebesar

Rp.4.880.823.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3.797.207.000	3.665.127.952	97
52	Belanja Barang	1.027.816.000	1.027.763.204	100
53	Belanja Modal	55.800.000	55.800.000	100
Jumlah Belanja Bruto		4.880.823.000	4.748.691.156	97
Pengembalian Belanja		0	0	
Jumlah Belanja Netto		4.880.823.000	4.748.691.156	97

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.165.094.040 atau sebesar 3,60 % dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu pada periode yang sama (31 Desember 2022). Hal ini disebabkan adanya mutasi Hakim yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus sehingga berdampak pada realisasi belanja pegawai yang meningkat.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022*(dalam rupiah)*

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 DES 2023	31 DES 2022	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	3.665.127.952	3.155.732.423	509.395.529	16,14
52	Belanja Barang	1.027.763.204	1.067.207.045	(39.443.841)	(3,69)
53	Belanja Modal	55.800.000	360.657.648	(304.857.648)	(84,52)
Jumlah Belanja Netto		4.748.691.156	4.583.597.116	165.094.040	3,60

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.3.665.127.952,
00

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.665.127.952,00 dan Rp. 3.155.732.423,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami Kenaikan sebesar Rp.509.395.509,00 atau 16,14 % dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan adanya mutasi masuk Hakim Ke Pengadilan Agama Kudus.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.423.753.300	1.339.836.680	83.916.620	6,26
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.724	20.245	479	2,35
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	111.512.578	98.967.216	12.545.362	12,67
Belanj Tunj.Anak PNS	31.978.815	27.716.801	4.262.014	15,37
Belanja Tunj.Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	0	0
Belanja Tunj.Fungsional PNS	1.558.925.000	1.182.110.000	376.815.000	31,87
Belanj Tunj.PPh PNS	179.537.833	139.377.987	40.159.846	28,81
Belanja Tunj.Beras PNS	84.204.780	75.823.740	8.381.040	11,05
Belanja Uang Makan PNS	219.650.000	235.240.000	(15.590.000)	(6,62)
Belanja Tunj.Umum PNS	19.145.000	20.610.000	(1.465.000)	(7,10)
Realisasi Belanja Bruto	3.665.128.030	3.156.102.669	509.025.361	16,12
Pengembalian	(78)	(370.246)	370.168	99,96
Realisasi Belanja Netto	3.665.127.952	3.155.732.423	509.395.529	16,14

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.1.027.763.204,00

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.027.763.204,00 dan Rp.1.067.207.045,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp.39.443.841,00 atau (3,83) % dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022 terdapat Belanja Langganan Listrik dengan Pagu Anggaran Setelah Revisi senilai Rp 114.876.000,00 dan Realisasi Belanja senilai Rp.114.873.756,00. Belanja Langganan Listrik tersebut masih ditanggung oleh DIPA Masing-masing satker sedangkan Pada Tahun 2023, Belanja Langganan Listrik sudah ditanggung oleh Pusat. Hal tersebutlah yang menyebabkan realisasi Belanja Barang Tahun 2023 mengalami penurunan.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	546.510.457	544.100.698	2.409.759	0,44
Belanja Barang Non Operasional	7.008.000	0	7.008.000	100,00
Belanja Barang persediaan	14.514.800	16.068.000	(1.553.200)	(9,66)
Belanja Jasa	57.541.720	157.275.232	(99.733.512)	(63,4)
Belanja Pemeliharaan	329.498.227	298.885.515	30.612.712	10,24
Belanja Perjalanan Dinas	72.690.000	50.877.600	21.812.400	42,87
Realisasi Belanja Bruto	1.027.763.204	1.067.207.045	(39.443.841)	(3,69)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	1.027.763.204	1.067.207.045	(39.443.841)	(3,69)

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.55.800.000,00

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.55.800.000,00 dan Rp.360.657.648,00. Pada Semester 1 Tahun Anggaran 2023 ini Pengadilan Agama Kudus tidak mendapatkan Anggaran 53 (Belanja Modal). Namun mendapatkan Anggaran Belanja Modal setelah revisi sebesar Rp55.800.000,00. Anggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk Belanja Peralatan

Fasilitas Perkantoran (5 unit Lemari Arsip, 1 Unit Filing Cabinet, 6 Unit Kursi Hakim, 6 Unit Kursi Panitera Muda dan Kasubbag, serta 4 Unit Kursi Hadap untuk Ruang Media Center)
Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.800.000	360.657.648	(304.857.648)	(84,52)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	55.800.000	360.657.648	(304.857.648)	(84,52)
Pengembalian	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	55.800.000	360.657.648	(304.857.648)	(84,52)

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.55.800.000,00 dan Rp.360.657.648,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan Pada Tahun Anggaran 2023 ini Pengadilan Agama Kudus tidak mendapatkan Anggaran 53 (Belanja Modal) pada Semester I TA 2023 dan telah mendapatkan Anggaran Belanja Modal setelah revisi sebesar Rp55.800.000,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.800.000	360.657.648	(304.857.648)	(84,52)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengadaan	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	55.800.000	360.657.648	(304.857.648)	(84,52)
Pengembalian	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	55.800.000	360.657.648	(304.857.648)	(84,52)

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS SEMESTER II TAHUN 2023

Belanja Modal Lainnya	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, tidak terjadi kenaikan atau sebesar 0,00%. Hal ini dikarenakan Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya melalui mekanisme SP2D Nihil dengan nomor 221229709259 tanggal 29 Desember 2022 dan SSBP pengembalian sisa UP dengan Nomor NTPN 3AC652CNQ78QV3G2 tanggal 29 Desember 2022. Serta untuk Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya melalui mekanisme SP2D Nihil dengan nomor 231291701000192 tanggal 19 Desember 2023 dan SSBP pengembalian sisa UP dengan Nomor NTPN FE8920JUNV60CU9I tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp 3.441.554,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Des 2023 dan 31 Des 2022

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember TA 2022
1.	Uang Persediaan per 31 Desember 2023	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kudus per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di SPM kan	0
2	Uang Tunai di Brankas	0
3	Uang di Rekening Bank	-
	Total	0
	Pajak	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		0

Persediaan
Rp.4.468.900,00

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.4.468.900,00 dan Rp.3.668.800,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.800.100,00 atau 21,81 %.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	Mutasi	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	3.668.800	800.100	4.468.900
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah		3.668.800	800.100	4.468.900

Tanah
Rp13.325.572.000,00

C.3 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Badan Urusan Administrasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13.325.572.000,00 dan Rp.13.325.572.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	13.325.572.000
Mutasi Tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	13.325.572.000

Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2023

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Nomor 005, Tanggal 21 Juli 2009	Jl. Raya Kudus-Pati Km.04 Dersalam Kudus 59321	Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI	3.172	Rp 4.071.450.000

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp.2.774.820.5
83,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.2.774.820.583,00 dan Rp.2.569.620.583,00, terjadi kenaikan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp.205.200.000,00 karena pada periode awal tahun 2023 terdapat Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dilakukan pencatatan pada Aplikasi SAKTI tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor : 613/BUA.7/BAST/BMN-SS/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 berupa 2 Unit Scanner (Peralatan Personal Komputer) dengan Kode Barang 3.10.02.03.004 NUP 3 & 4 senilai Rp 19.850.000,00 dengan total Rp 39.700.000,00 dan 1 Unit Server dengan Kode Barang 3.10.02.04.001 NUP 4 senilai Rp 84.700.000 dengan Total Transfer Masuk Alat Pengolah Data tersebut senilai Rp 124.400.000,00.

Pada tanggal 20 Juli 2023 terdapat Transfer Masuk Laptop Axioo sebanyak 2 unit dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 2231/DjA.1/PL.04/07/2023. Laptop Axioo dengan Kode Barang 3.100.10.20 NUP 636 hingga NUP 637 dengan Nilai Perolehan per unit Rp12.500.000,00 dan Total nilai Transfer Barang senilai Rp25.000.000,00.

Pada tanggal 25 Oktober 2023 terdapat Berita Acara Serah Terima Barang atas Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan Nomor : 2138/SEK.PA.W11-A16/PL1.1.2/X/2023 senilai Rp 55.800.000,00. Kontrak tersebut berisi Pembelian Peralatan Mebelair diantaranya 5 unit Lemari Arsip, 1 Unit Filing Cabinet, 6 Unit Kursi Hakim, 6 Unit Kursi Panitera Muda dan Kasubbag, serta 4 Unit Kursi Hadap untuk Ruang Media Center.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	2.569.620.583
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk (Intrakomptabel)	205.200.000
Jumlah Mutasi Tambah	205.200.000
Transfer Keluar ke BUA	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-

Saldo Per 31 Desember 2023	2.774.820.583
Akumulasi Penyusutan	(2.190.906.514)
Nilai Buku	583.914.069

C.5 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp.5.215.965.000,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.5.215.965.000,00 dan Rp.5.215.965.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	5.215.965.000
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2023	5.215.965.000
Akumulasi Penyusutan	751.588.488
Nilai Buku	4.464.376.512

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.0,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	0
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp.6.527.887,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.6.527.887,00 dan Rp.6.527.887,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	6.527.887
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2023	6.527.887
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	6.527.887

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	0
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(2.948.023.802,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(2.948.023.802,00) dan Rp(2.623.710.056,00) , terjadi kenaikan sebesar (Rp.324.313.746,00) atau 12,36 %.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	13.325.572.000		13.325.572.000
2	Peralatan dan Mesin	2.774.820.583	(2.190.906.514)	583.914.069
3	Gedung dan Bangunan	5.215.965.000	(751.588.488)	4.464.376.512
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	6.527.887	-	6.527.887
6	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dlm Operasional Pemerintahan	5.528.800	(5.528.800)	-
Jumlah		21.328.414.270	2.948.023.802	18.380.390.468

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0,00 dan Rp.4.900.000,00.

Aset Tak
Berwujud
Rp.0,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Urusan Administrasi berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Dalam upaya tertib penatausahaan BMN maka dilakukan Permohonan Persetujuan Pemusnahan Aset Tak Berwujud berupa Software Komputer dengan Kode Barang 8.01.01.01.001, Merk Kaspersky, NUP 1, dengan Harga Perolehan senilai Rp 4.900.000 dengan Nomor : W11-A16/1115/PL.03/V/2023. Permohonan Pemusnahan BMN Aset Tak Berwujud telah mendapatkan Persetujuan Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 326/SEK/PL1.2.3/X/2023. Kemudian telah dilakukan Tindak Lanjut atas persetujuan Pemusnahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan Berita Acara Pemusnahan BMN Nomor : 2126/KPA.W11-A16/PL1.2.3/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Setelah dilakukan Pemusnahan terhadap BMN tersebut dilanjutkan dengan Permohonan Penghapusan Aset Tak Berwujud dengan pengajuan Nomor : 2149/KPA.W11-A16/PL1.2.3/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023. Kemudian telah terbit SK Penghapusan dengan Nomor : 1244/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Agama Kudus.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	4.900.000
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	(4.900.000)
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

C.11 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp.5.528.800,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.5.528.800,00 dan Rp.16.328.800,00, terjadi penurunan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp 10.800.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya penjualan BMN sebagai tindak lanjut penghapusan BMN berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Suzuki ST 100 tahun 1988 dengan Nomor Polisi K 9506 EK sebanyak 1 unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 10.800.000,00. Dan telah mendapatkan SK Penghapusan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 226/SEK/SK/V/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Alat Angkutan Bermotor pada Pengadilan Agama Kudus. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Kudus serta dalam proses penghapusan/Pemusnahan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	16.328.800
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	(10.800.000)
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2023	5.528.800
Akumulasi Penyusutan	(5.528.800)
Nilai Buku	0

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.(10.428.800,0
0)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.(10.428.800,00) dan Rp.(21.228.800,00), terjadi penurunan sebesar Rp.10.800.000,- atau 50,87 %.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 September 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	4.900.000,00	(4.900.000,00)	0
2	Aset Lain-lain	5.528.800,00	(5.528.800,00)	0
Jumlah		10.428.800	(10.428.800)	0

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.19.205.779,0
0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.19.205.779,00 dan Rp.1.240.508,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih harus di bayar	19.044.000	
2	Belanja Barang yang masih harus di bayar	161.779	
Jumlah		19.205.779	

Uang muka dari

C.14 Uang Muka dari KPPN

KPPN Rp.0
,00

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN pada tahun 2022 dibagi atas dua macam, yaitu Uang Persediaan (UP) berupa uang tunai pada kas bendahara pengeluaran dan Uang Persediaan (UP) berupa Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Ekuitas

Rp.18.365.453.
589,00

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.18.365.453.589,00 dan Rp.18.512.532.506,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNB
Rp.1.734.405,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.734.405,00 dan Rp.1.200.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Pendapatan atas Sewa Kantin untuk Pembayaran ke-3 sewa lahan telah dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2023 dengan kode akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan) sejumlah Rp.1.200.000,- dengan bukti NTB 324974638244 dan NTPN A9ACF55DEVS0UJPT.

Pada Neraca tanggal 30 Juni 2023 terdapat Akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp 34.881,00 selama 5 bulan dan terakumulasi sebesar Rp.174.405,00 merupakan hasil dari pemotongan gaji Hakim atas Sewa Rumah Dinas untuk satker yang lama, sehingga akun tersebut akan hilang setelah terbit SP2D.

Terdapat Koreksi Surat Perjanjian Sewa Kantin pada Pengadilan Agama Kudus yang mengharuskan terdapatnya Klausul Biaya Listrik yang dibebankan bagi pihak penyewa kantin sehingga untuk jangka waktu sewa kantin selama 3 tahun (36 bulan) dikenakan perbulannya sebesar Rp 10.000,00 sehingga terdapat Penerimaan Negara senilai Rp 360.000,00 dengan Bukti Penerimaan Negara NTB 968154357339 dan NTPN E0B767QLUG4TV9EO

Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Des 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	1.734.405	1.200.000	44,53
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		1.734.405	1.200.000	44,53
Pendapatan Lain-lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan	0	0	0
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain		0	0	0
Total		1.734.405	1.200.000	44,53

D.2 Beban Pegawai*Beban Pegawai**Rp.3.683.069.518,00*

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.683.069.518,00 dan Rp.3.156.834.857,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)
				%
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.422.766.200	1.340.823.780	6,11
2	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-78	-246	68,29
3	Beban Pembulatan Gaji PNS	20.602	20.367	1,15
4	Beban Tunj.Suami/Istri PNS	111.429.248	99.050.546	12,49
5	Beban Tunj.Anak PNS	31.946.933	27.748.683	15,12
6	Beban Tunj.Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	0
7	Beban Tunj.Fungsional PNS	1.559.805.000	1.182.110.000	31,95
8	Beban Tunj.PPh PNS	179.537.833	139.377.987	28,81
9	Beban Tunj.Beras PNS	84.204.780	75.823.740	11,05
10	Beban Uang Makan PNS	237.814.000	235.240.000	1,09
11	Pengembalian Beban Tunj.Umum PNS	0	-370.000	100
12	Beban Tunj.Umum PNS	19.145.000	20.610.000	(7,1)
Total		3.683.069.518	3.156.834.857	16,67
Pengembalian		0	0	0
Netto		3.683.069.518	3.156.834.857	16,67

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.13.714.700,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13.714.700,00 dan Rp.13.744.100,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	13.714.700	13.744.100	(0,43)
2	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		13.714.700	13.744.100	(0,43)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp.611.083.882,00

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.611.083.882,00 dan Rp.690.879.273,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	495.117.057	441.582.500	12,12
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	112.500	167.800	(32,95)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46.512.000	34.900.000	33,27
4	Beban Barang Operasional Lainnya	4.768.900	65.893.732	(92,76)
5	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7.008.000	0	99
6	Beban Langganan Listrik	0	105.984.519	0
7	Beban Langganan Telepon	1.481.275	1.686.722	(12,18)
8	Beban Langganan Air	3.884.150	0	99
9	Beban Sewa	52.200.000	35.700.000	46,21
10	Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	0	4.964.000	0
Total		611.083.882	690.879.273	(11,55)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp.329.498.227,00

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.329.498.227,00 dan Rp.298.885.515,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	228.267.000	196.992.600	15,87
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.231.227	101.892.915	(0,64)
3	Beban Suku Cadang	0	0	0
Total		329.498.227	298.885.515	10,24

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.72.690.000,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.72.690.000,00 dan Rp.50.877.600,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 September 2023 dan 30 September 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	69.170.000	49.777.600	38,95
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.520.000	1.100.000	99
Total		72.690.000	50.877.600	42,87

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.316.438.746,00 dan Rp.313.395.917,00. Beban

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp.316.438.746,00

Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	191.173.998	188.131.169	1,61
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	125.264.748	125.264.748	0
Jumlah Penyusutan		316.438.746	313.395.917	0,97
3	Beban Amortisasi Software	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi		316.438.746	313.395.917	0,97
Total		316.438.746	313.395.917	0,97

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp.0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNB	0	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian lancar Tagihan TP/TGR	0	0	0
4	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total		0	0	0

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.12.509.000,00

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
2	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	12.509.000	3.303.303	99,00
Total		12.509.000	3.303.303	99,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.18.512.532.506,00 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.512.532.506,00 dan Rp. 18.172.567.902,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp(5.012.251.668,00) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp.(5.012.251.668,00) dan Rp.(4.520.143.959,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,00 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp.0,00 Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp.0,00 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain
Rp.0,00 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah dibuat per 31 Desember 2022, berupa Temuan BPK RI Tahun 2022 yang belum selesai di Tahun 2023.

No	Uraian	Jumlah
1	Temuan BPK RI Tahun 2023	0
Total		0

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp.4.865.172.751,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.865.172.751,00 dan Rp.4.860.108.563,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.748.691.156
Diterima dari Entitas Lain	(14.243.405)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	130.725.000
Pengesahan Hibah Langsung	0
	4.865.172.751

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.(14.243.405,00) sedangkan DKEL sebesar Rp.4.748.691.156,00.

E.7.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.124.400.000,00. Hal tersebut Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2022, dimana terdapat proses transfer keluar dan transfer masuk yang dilakukan pada tahun 2022 namun aset diterima pada tahun 2023. Untuk itu dilakukan koreksi pada satuan kerja dengan cara melakukan Transfer Keluar kepada satker Pengirim pada Periode 14 (ADJ 2) Tahun 2022.

Ekuitas Akhir

E.8 Ekuitas Akhir

*Rp.18.365.453.589
,00*

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.18.365.453.589,00 dan Rp. 18.512.532.506,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2023 pada Pengadilan Agama Kudus yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Terdapat hasil audit BPK yang ditindak lanjuti Pengadilan Agama Kudus per 31 Desember tahun 2023 yaitu Terdapat Tagihan berupa Biaya Listrik dan Air Sewa BMN (Kantin) PA Kudus yang ditagihkan kepada Pihak Penyewa selama 3 tahun dari Maret 2021 s.d. Maret 2024. Sehubungan dengan temuan BPK tersebut telah kami tindak lanjuti dengan Pembayaran Biaya Listrik dan Air untuk Sewa Kantin periode 3 tahun mulai dari Maret 2021 s.d. Maret 2024. Pembayaran tersebut telah disetor ke Kas Negara dengan Bukti Setor NTB 968154357339 dan NTPN E0B767QLUG4TV9EO senilai Rp 360.000,00.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Kudus adalah:

Rekening Bendahara pengeluaran pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Kudus A/C 653244009731000 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400973 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0.

Surat ijin penerbitan persetujuan kembali rekening virtual oleh Kepala KPPN Kudus Nomor 000029 tanggal 30 April 2021, setelah rekening giro yang sebelumnya di tutup sesuai dengan tahapan restrukturisasi rekening Pemerintah mengikuti PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga serta surat dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor S-762/PB.3/2022 tanggal 21 April 2021 tentang Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Lingkup Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

2. Revisi DIPA

Daftar Rincian Rincian DIPA BUA 01

Tahun 2023

NO	REVISI	TGL	DIGITAL STAMP	PAGU		KET
				SEMULA	REVISI	
1.	I	14 Februari 2023	2103-4950-1127-4242	4.502.023.000	4.502.023.000	Rev.Administrasi
2.	II	6 Maret 2023	2103-4950-1127-4242	4.502.023.000	4.502.023.000	Rev. Hal III
3.	III	6 Juli 2023	2103-4950-1127-4242	4.502.023.000	4.502.023.000	Rev. Hal III
4.	IV	1 September 2023	3095-6870-5516-1763 4281-0954	4.502.023.000	4.557.823.000	-Revisi Anggaran Pagu Tetap -Revisi Administrasi
5.	V	23 Oktober 2023	5305-6527-8024-1596	4.557.823.000	4.859.823.000	-Revisi Anggaran Pagu Tetap -Revisi Administrasi
6.	VI	30 November 2023	7830-8931-8775-7012	4.859.823.000	4.880.823.000	-Revisi Anggaran Pagu Tetap -Revisi Administrasi

DIPA pada Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2023 bernomor : DIPA-005.01-2.400973/2023 tanggal 30 November 2022 berjumlah sebesar Rp.4.502.023.000,00 (empat milyar lima ratus dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	521252	7.008.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00

	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	291.438.000,00
	521811	17.000.000,00
	521111	174.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	1.200.000,00
	522141	3.600.000,00
	523111	197.220.000,00
	523121	124.270.000,00
	521111	23.314.000,00
	521115	65.076.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	7.680.000,00
	524113	1.760.000,00
	522141	32.400.000,00
	Total	<u>4.502.023.000,00</u>

b. Revisi ke-1 DIPA 400973 (Tanggal 14 Februari 2023)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 1, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	521252	7.008.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00

	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	291.438.000,00
	521811	17.000.000,00
	521111	174.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	1.200.000,00
	522141	3.600.000,00
	523111	197.220.000,00
	523121	124.270.000,00
	521111	23.314.000,00
	521115	65.076.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	7.680.000,00
	524113	1.760.000,00
	522141	32.400.000,00
	Total	4.502.023.000,00

c. Revisi KE-2 DIPA 400973 (Tanggal 06 Maret 2023)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 1, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	521252	7.008.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	292.467.000,00
	521811	17.000.000,00

	521111	174.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	3.500.000,00
	522141	3.600.000,00
	523111	226.170.000,00
	523121	104.320.000,00
	521111	23.314.000,00
	521115	46.512.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	56.475.000,00
	524111	1.920.000,00
	524113	3.080.000,00
	522141	32.400.000,00
	Total	<u>4.502.023.000,00</u>

- d. Revisi ke-3 DIPA 400973 (Tanggal 06 Juli 2023)
 - e. Revisi ke-4 DIPA 400973 (Tanggal 1 September 2023) : Terdapat Penambahan Anggaran Belanja Modal senilai Rp 55.800.000,00
 - f. Revisi ke-5 DIPA 400973 (Tanggal 23 Oktober 2023)
 - g. Revisi ke-6 DIPA 400973 (Tanggal 30 November 2023)
 - h.
3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAKTI.
 - a. Jurnal Penyesuaian
 - Pada tanggal 31 Desember 2022 penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran 2022.
 4. Perbaikan Transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP

Terdapat perbaikan transaksi SSPB (Surat Setoran Bukan Pajak) pada tanggal 06 Maret 2023 Nomor W11-A16/621/KU.04/III/2023 tentang Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Yang berasal dari transaksi hasil Penjualan BMN berupa Kendaraan Roda 4 Suzuki Station Wagon ST100 (K 9506 EK). Yaitu adanya kesalahan kode satker, yang seharusnya masuk kode satker 400973 (DIPA 01) tetapi masuk kedalam kode satker 400974 (DIPA 04) serta perubahan akun dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425122) menjadi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122). Dengan total transaksi Rp.12.509.000,00. Telah di tindak lanjuti dengan terbitnya surat dari KPPN Kudus Nomor S-146/KPN.1405/2023 dan telah dituangkan dalam Nota Perbaikan Transaksi Negara Nomor 129/03/2023 tanggal 07 Maret 2023.

5. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Nomor W11-A16/26/KU.01/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengelola Penerimaan PNBPN serta Staf Pengelola Keuangan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Penandatanganan SPM	:	Umardhani, SHI.
Bendahara Pengeluaran	:	Eren Gilang Permana, A.Md.
Staf Keuangan-Operator SAIBA / PPABP	:	Agus Fatchurrochim Thoyib.
Staf Keuangan-Operator SAIBA /SIMAK-BMN	:	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TA. 2023

KODE	URAIAN	MM	KUAN TITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN PER 31 Desember 2023	NILAI BUKU PER 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	9	10
131111	Tanah		3.172	13.325.572.000	0	13.325.572.000
2.01.01	TANAH PERSIL	1	3.172	13.325.572.000	0	13.325.572.000
132111	PERALATAN DAN MESIN		660	2.774.820.583	(2.190.906.514)	583.914.069
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	7	530.315.976	(306.692.110)	223.623.866
3.03.03	ALAT UKUR	5	3	9.500.000	(9.500.000)	0
3.05.01	ALAT KANTOR	5	115	275.930.400	(260.900.400)	15.030.000
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	416	719.697.556	(653.783.422)	65.914.134
3.06.01	ALAT STUDIO	5	11	76.285.820	(37.694.946)	38.590.874
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	2	6.072.500	(6.072.500)	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	1	99.500.000	(99.500.000)	0
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	1	10.843.050	(6.144.395)	4.698.655
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	76	798.684.283	(645.377.743)	153.306.540
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	28	247.990.998	(165.240.998)	82.750.000
135121	ASET TETAP LAINNYA		64	6.527.887	0	6.527.887
4.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	64	64	6.527.887	0	6.527.887
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		4	5.215.965.000	(751.588.488)	4.464.376.512
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	3	4.973.086.000	(717.299.688)	4.255.786.312
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50	1	242.879.000	(34.288.800)	208.590.200
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		43	5.528.800	(5.528.800)	0
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	0	0	0	0

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS SEMESTER II TAHUN 2022

3.05.01	ALAT KANTOR	5	16	2.332.800	(2.332.800)	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	26	2.784.100	(2.784.100)	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	1	411.900	(411.900)	0
TOTAL			3.943	21.328.414.270	(2.948.023.802)	18.380.390.468

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
SEMESTER II TA. 2023

No	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
														Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
2.																

LAMPIRAN A.2**HIBAH**

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA JASA
PER 31 DESEMBER 2017

No	Nama Pemberi	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	Judicial Sector Support Program (JSSP) - Belanda	Jasa	LN	Rp 253.096.409	Rp 253.096.409	-	-
2	UE-UNDP	Jasa	LN	Rp 17.024.831.231	Rp 17.024.831.231	-	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA KUDUS 400973

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 8:46 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,880,823,000	4,748,691,156	(132,131,844)	97	4,604,857,000	4,583,597,116	(21,259,884)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Kudus, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



MOH. ASFARONI, SHI.
197806182003121002



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 400973 PENGADILAN AGAMA KUDUS

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 25/01/24 8:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12,509,000	0	12,509,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,734,405	0	1,734,405	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	14,243,405	0	14,243,405	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	14,243,405	0	14,243,405	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	14,243,405	0	14,243,405	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA : 400973 **PENGADILAN AGAMA KUDUS**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/01/24 8:47 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,369,833,000	1,448,333,000	1,423,753,300	0	1,423,753,300	98.3	24,579,700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000	22,000	20,724	78	20,646	94.2	1,354
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	136,985,000	113,971,000	111,512,578	0	111,512,578	97.84	2,458,422
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	27,395,000	32,714,000	31,978,815	0	31,978,815	97.75	735,185
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,400,000	36,400,000	36,400,000	0	36,400,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,373,110,000	1,650,525,000	1,558,925,000	0	1,558,925,000	94.45	91,600,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	274,535,000	188,962,000	179,537,833	0	179,537,833	95.01	9,424,167
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	63,411,000	85,726,000	84,204,780	0	84,204,780	98.23	1,521,220
511129	Belanja Uang Makan PNS	202,620,000	221,409,000	219,650,000	0	219,650,000	99.21	1,759,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,895,000	19,145,000	19,145,000	0	19,145,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,496,207,000	3,797,207,000	3,665,128,030	78	3,665,127,952	96.52	132,079,048
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,496,207,000	3,797,207,000	3,665,128,030	78	3,665,127,952	96.52	132,079,048
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	488,752,000	495,118,000	495,117,057	0	495,117,057	100	943
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	114,000	112,500	0	112,500	98.68	1,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	65,076,000	46,512,000	46,512,000	0	46,512,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,650,000	4,769,000	4,768,900	0	4,768,900	100	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	561,878,000	546,513,000	546,510,457	0	546,510,457	100	2,543
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,008,000	7,008,000	7,008,000	0	7,008,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,008,000	7,008,000	7,008,000	0	7,008,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17,000,000	14,516,000	14,514,800	0	14,514,800	99.99	1,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	17,000,000	14,516,000	14,514,800	0	14,514,800	99.99	1,200
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	1,525,000	1,524,500	0	1,524,500	99.97	500
522113	Belanja Langganan Air	1,200,000	3,818,000	3,817,220	0	3,817,220	99.98	780
522141	Belanja Sewa	36,000,000	52,200,000	52,200,000	0	52,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	43,200,000	57,543,000	57,541,720	0	57,541,720	100	1,280
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197,220,000	228,272,000	228,267,000	0	228,267,000	100	5,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA : 400973 **PENGADILAN AGAMA KUDUS**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/01/24 8:47 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124,270,000	101,234,000	101,231,227	0	101,231,227	100	2,773
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	321,490,000	329,506,000	329,498,227	0	329,498,227	100	7,773
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	53,480,000	69,210,000	69,170,000	0	69,170,000	99.94	40,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,760,000	3,520,000	3,520,000	0	3,520,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	55,240,000	72,730,000	72,690,000	0	72,690,000	99.95	40,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,005,816,000	1,027,816,000	1,027,763,204	0	1,027,763,204	99.99	52,796
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	55,800,000	55,800,000	0	55,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	55,800,000	55,800,000	0	55,800,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	55,800,000	55,800,000	0	55,800,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	4,502,023,000	4,880,823,000	4,748,691,234	78	4,748,691,156	97.29	132,131,844

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (400973) PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:46 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,734,405	1,200,000	534,405	44.534
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,734,405	1,200,000	534,405	44.534
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,734,405	1,200,000	534,405	44.534
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,683,069,518	3,156,834,857	526,234,661	16.67
Beban Persediaan	13,714,700	13,774,100	(59,400)	(0.431)
Beban Barang dan Jasa	611,083,882	690,879,273	(79,795,391)	(11.55)
Beban Pemeliharaan	329,498,227	298,885,515	30,612,712	10.242
Beban Perjalanan Dinas	72,690,000	50,877,600	21,812,400	42.872
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (400973) PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:46 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	316,438,746	313,395,917	3,042,829	0.971
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,026,495,073	4,524,647,262	501,847,811	11.091
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,024,760,668)	(4,523,447,262)	(501,313,406)	11.083
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	12,509,000	3,303,303	9,205,697	278.682
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	12,509,000	3,303,303	9,205,697	278.682
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	12,509,000	3,303,303	9,205,697	278.682
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,012,251,668)	(4,520,143,959)	(492,107,709)	10.887
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,012,251,668)	(4,520,143,959)	(492,107,709)	10.887

Keterangan :

FINAL

Kudus, 31 Desember 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran




MOH. ASFARONI, SHI.
197806182003121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (400973) PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:46 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	18,512,532,506	18,172,567,902	339,964,604	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,012,251,668)	(4,520,143,959)	(492,107,709)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,865,172,751	4,860,108,563	5,064,188	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(147,078,917)	339,964,604	(487,043,521)	-
EKUITAS AKHIR	18,365,453,589	18,512,532,506	(147,078,917)	-

Keterangan :

FINAL

Kudus, 31 Desember 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



MOH. ASFARONI, SHI.

197806182003121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (400973) PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:46 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,468,900	0
0.0	131111	Tanah	13,325,572,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,774,820,583	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,215,965,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,527,887	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,190,906,514
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	751,588,488
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5,528,800	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	5,528,800
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	19,044,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	161,779
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	200,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,748,691,156
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	14,243,405	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	130,725,000
0.0	391111	Ekuitas	0	18,512,532,506
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12,509,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,734,405
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,422,766,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	20,524	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	111,429,248	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	31,946,933	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36,400,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,559,805,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	179,537,833	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	84,204,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	237,814,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19,145,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	495,117,057	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	112,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46,512,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	4,768,900	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,008,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,481,275	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,884,150	0
3.0	522141	Beban Sewa	52,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	228,267,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101,231,227	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (400973) PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:46 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	69,170,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,520,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	191,173,998	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	125,264,748	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	13,714,700	0
JUMLAH			26,373,621,648	26,373,621,648

Keterangan :

FINAL

Kudus, 31 Desember 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



MOH. ASFARONI, SHI.

197806182003121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (400973) PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:47 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,748,691,156
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	14,243,405	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12,509,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,734,405
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,423,753,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,724	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	111,512,578	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,978,815	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,558,925,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	179,537,833	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	84,204,780	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	219,650,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,145,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	495,117,057	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	112,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	46,512,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,768,900	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,008,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,514,800	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,524,500	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,817,220	0
3.0	522141	Belanja Sewa	52,200,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	228,267,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101,231,227	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	69,170,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,520,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,800,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	78
JUMLAH			4,762,934,639	4,762,934,639

Keterangan :

FINAL

Kudus, 31 Desember 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



MOH. ASFARONI, SHI.

197806182003121002

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400973 PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 9:00 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		3,172	13,325,572,000	0	0	0	0	13,325,572,000
20101	TANAH PERSIL	-	3,172	13,325,572,000	0	0	0	0	13,325,572,000
132111	Peralatan dan Mesin		660	2,774,820,583	(1,981,057,516)	(209,848,998)	0	(2,190,906,514)	583,914,069
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	7	530,315,976	(262,383,875)	(44,308,235)	0	(306,692,110)	223,623,866
30303	ALAT UKUR	-	3	9,500,000	(9,500,000)	0	0	(9,500,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	115	275,930,400	(259,230,400)	(1,670,000)	0	(260,900,400)	15,030,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	416	719,697,556	(641,095,098)	(12,688,324)	0	(653,783,422)	65,914,134
30601	ALAT STUDIO	-	11	76,285,820	(24,931,382)	(12,763,564)	0	(37,694,946)	38,590,874
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	6,072,500	(6,072,500)	0	0	(6,072,500)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	99,500,000	(99,500,000)	0	0	(99,500,000)	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	1	10,843,050	(5,421,525)	(722,870)	0	(6,144,395)	4,698,655
31001	KOMPUTER UNIT	-	76	798,684,283	(556,831,738)	(88,546,005)	0	(645,377,743)	153,306,540
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	28	247,990,998	(116,090,998)	(49,150,000)	0	(165,240,998)	82,750,000
133111	Gedung dan Bangunan		4	5,215,965,000	(626,323,740)	(125,264,748)	0	(751,588,488)	4,464,376,512
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	3	4,973,086,000	(597,749,740)	(119,549,948)	0	(717,299,688)	4,255,786,312
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	242,879,000	(28,574,000)	(5,714,800)	0	(34,288,800)	208,590,200
135121	Aset Tetap Lainnya		64	6,527,887	0	0	0	0	6,527,887
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	64	6,527,887	0	0	0	0	6,527,887
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		43	5,528,800	(16,328,800)	10,800,000	0	(5,528,800)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	(10,800,000)	10,800,000	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	16	2,332,800	(2,332,800)	0	0	(2,332,800)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	26	2,784,100	(2,784,100)	0	0	(2,784,100)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	1	411,900	(411,900)	0	0	(411,900)	0
JUMLAH			3,943	21,328,414,270	(2,623,710,056)	(324,313,746)	0	(2,948,023,802)	18,380,390,468

KUDUS, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Moh. Asfaroni, SHI
197806182003121002



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (400973) PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:46 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	4,468,900	3,668,800	800,100	21.81
JUMLAH ASET LANCAR	4,468,900	3,668,800	800,100	21.81
ASET TETAP				
Tanah	13,325,572,000	13,325,572,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,774,820,583	2,569,620,583	205,200,000	7.99
Gedung dan Bangunan	5,215,965,000	5,215,965,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	6,527,887	6,527,887	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,942,495,002)	(2,607,381,256)	(335,113,746)	12.85
JUMLAH ASET TETAP	18,380,390,468	18,510,304,214	(129,913,746)	(0.70)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	4,900,000	(4,900,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	5,528,800	16,328,800	(10,800,000)	(66.14)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(5,528,800)	(21,228,800)	15,700,000	(73.96)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	18,384,859,368	18,513,973,014	(129,113,646)	(0.70)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	19,205,779	1,240,508	17,965,271	1,448.22
Pendapatan Diterima Dimuka	200,000	200,000	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19,405,779	1,440,508	17,965,271	1,247.15
JUMLAH KEWAJIBAN	19,405,779	1,440,508	17,965,271	1,247.15
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	18,365,453,589	18,512,532,506	(147,078,917)	(0.79)
JUMLAH EKUITAS	18,365,453,589	18,512,532,506	(147,078,917)	(0.79)
JUMLAH EKUITAS	18,365,453,589	18,512,532,506	(147,078,917)	(0.79)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18,384,859,368	18,513,973,014	(129,113,646)	(0.70)

Keterangan :

FINAL

Kudus, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



MOH. ASFARONI, SHI.
197806182003121002

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN KEUANGAN DIPA 04
Semester II Tahun 2023

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Kudus - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

e-mail : paKudus01@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Kudus - Pati KM 04 Kab. Kudus

Telp./Fax. 0291-438 385

Kudus - Jawa Tengah 59321

e-mail : keuanganpakudus@yahoo.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Kudus adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kudus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kudus, 29 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Moh. Asfaroni, SHI

NIP.197806182003121002

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4. Basis Akuntansi	15
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar.....	27
C.2. Aset Tetap	29
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.6. Ekuitas.....	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	32
D.2. Beban Pegawai	32

D.3.	Beban Persediaan	32
D.4.	Beban Barang dan Jasa	33
D.5.	Beban Pemeliharaan	33
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	34
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	34
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	34
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	34
D.11.	Beban Lain-lain.....	35
D.12.	Kegiatan Non Operasional	35
D.13.	Pos Luar Biasa	35
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	36
E.1.	Ekuitas Awal	36
E.2.	Surplus (defisit) LO	36
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	36
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	36
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	36
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	36
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	37
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	37
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	37
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	38
E.3.	Ekuitas Akhir.....	38
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	39
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	39
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	39
	incian Nilai Perolehan, Akumulasi PenyustaPengadilan Agama Kudus	41

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023	24
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023 dan 2022.....	25
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023	25
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023	26
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	26
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	27
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022	28
Tabel 24 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022	28
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan & Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	41
Tabel 38 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	42

Pengadilan Agama Kudus

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Kudus - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014 e-mail : paKudus01@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester II Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kudus, 29 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Moh. Asfaroni, SHI

NIP.197806182003121002

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp185.549.000,- atau mencapai 110 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp168.941.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp 46.680.000,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 46.680.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 2022 .

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4.403.730,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 4.403.730,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp4.403.730,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp4.403.730,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.185.549.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.51.412.900,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.134.136.100,- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp.134.136.100,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.732.900,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp134.136.100,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(134.465.270) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp4.403.730,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	168.941.000	185.549.000	110,00	196.158.500
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		168.941.000	185.549.000	110,00	196.158.500
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	46.680.000	46.680.000	100,00	78.601.500
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		46.680.000	46.680.000	100,00	78.601.500

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA KUDUS
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank		0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	4.403.730	4.732.900
Jumlah Aset Lancar		4.403.730	4.732.900
Aset Tetap	C.2	0	0
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		4.403.730	4.732.900
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.5. 1.	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar	C.6	0	0
Jumlah Ekuitas Dana		4.403.730	4.732.900
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		4.403.730	4.732.900

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	185.549.000	196.158.500
Jumlah Pendapatan		185.549.000	196.158.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	6.832.900	2.996.400
Beban Barang dan Jasa	D. 4	36.180.000	36.000.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	8.400.000	41.810.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		51.412.900	80.806.400
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		134.136.100	115.352.100
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	134.136.100	115.352.100
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	134.136.100	115.352.100

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	E. 1	4.732.900	3.112.800
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	134.136.100	115.352.100
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(134.465.270)	(113.732.000)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(329.170)	1.620.100
Ekuitas Akhir		4.403.730	4.732.900

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat.

- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2022 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2022.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Visi Pengadilan Agama Kudus adalah terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Misi Pengadilan Agama Kudus adalah:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan beberapa langkah-langkah strategis yaitu melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kudus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Kudus menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Badan Urusan Administrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2023	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan	168.941.000	168.941.000
Jumlah Pendapatan	168.941.000	168.941.000
Belanja		
Belanja Barang	46.680.000	46.680.000
Jumlah Belanja	46.680.000	46.680.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp142.119.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.185.549.000,- atau mencapai 110 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.168.941.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	53.290.000	48.675.000	91,34
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	110.161.000	112.394.000	102,03
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	5.490.000	24.480.000	445,9
	Total Pendapatan	168.941.000	185.549.000	109,83

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.10.609.500,- atau 5,4 persen dibandingkan TA 2022. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan Pendapatan Ongkos Perkara dan penurunan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	24.480.000	22.850.000	1.630.000	7,13
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	48.675.000	58.005.000	(9.330.000)	(16,08)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	112.394.000	115.303.500	(2.909.500)	(2,52)
Total Pendapatan		185.549.000	196.158.500	(10.609.500)	(5,40)

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
46.680.000*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Kudus per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp.46.680.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100 % dari anggaran senilai Rp.46.680.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

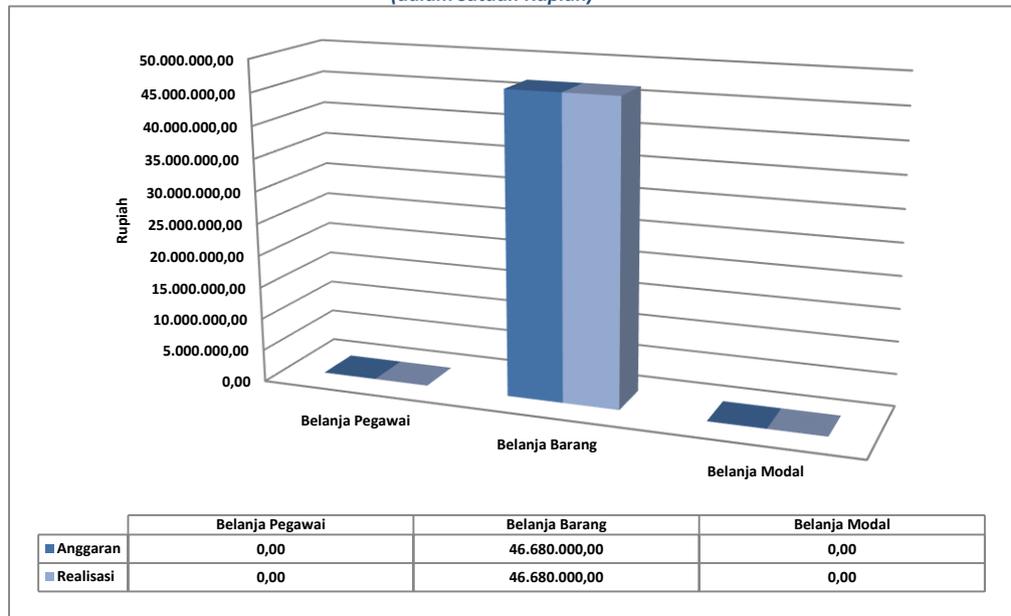
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	46.680.000	46.680.000	100
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	46.680.000	46.680.000	100

Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	46.680.000	46.680.000	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAKTI) 2023 & 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp.9.748.500,- atau sebesar (27,45) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
				Rp	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
52	Belanja Barang	46.680.000	78.601.500	(31.921.500)	(40,61)
53	Belanja Modal	0	0	0	0,00
	Total Belanja	46.680.000	78.601.500	(31.921.500)	(40,61)

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang Rp
46.680.000,-*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Kudus per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.46.680.000,- dan Rp.78.601.500,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar (40,61) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
		Realisasi	Realisasi	Rp	%
52	Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
52	Belanja Barang Persediaan	2.100.000	791.500	1.308.500	165,31
52	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000	41.810.000	(33.410.000)	(79,9)
52	Belanja Jasa	36.180.000	36.000.000	(180.000)	(0,5)
	Total Belanja Brutto	46.680.000	78.601.500	(31.921.500)	(40,61)
	Pengembalian Belanja	0	0	0	0
	Total Belanja Netto	46.680.000	78.601.500	(31.921.500)	(40,61)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:
Rp 4.403.730,-*

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.403.730,- dan Rp.4.732.900,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Kudus per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 7 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	4.403.730	4.732.900
Total Aset Lancar	4.403.730	4.732.900

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp4.403.730*

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.4.403.730,- dan Rp. 4.732.900,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	4.403.730	4.732.900
2	Amunisi	0	0

3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		4.403.730	4.732.900

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 0 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga I
Rp.0*

Utang kepada Pihak Ketiga I merupakan piutang dari KPPN melalui uang persediaan yang di terima oleh Pengadilan Agama Kudus pada awal tahun sejumlah Rp.0

C.5.3. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang yang
belum di
tagihkan Rp.0,-*

Utang yang belum di tagihkan adalah sisa dari kuitansi atau nota yang belum di SP2D kan sejumlah Rp.0,-,-

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp 4.403.730,-*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.403.730,- dan Rp4.732.900,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp :
Rp185.549.000,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp185.549.000,- dan Rp196.158.500,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	5.490.000	24.480.000	445,9
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	53.290.000	48.675.000	91,34
3.	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	110.161.000	112.394.000	102,03
Total Pendapatan		168.941.000	185.549.000	109,83

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp6.832.900,00*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.832.900,- dan Rp2.996.400,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	6.832.900	2.996.400	3.836.500	128,037
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	6.832.900	2.996.400	3.836.500	120,037

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
Jasa :
Rp36.180.000,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36.180.000,- dan Rp36.000.000,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	36.180.000	36.000.000	180.000	0,5
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Barang dan Jasa	36.180.000	36.000.000	180.000	0,5

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp8.400.000,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.400.000,- dan Rp41.810.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.732.900,- dan Rp3.112.800,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp134.136.100,- dan Rp115.352.100,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. Dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp134.465.270,-) dan (Rp113.732.000,-)

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2023

(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(185.549.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	46.680.000
Transfer Masuk	4.403.730
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(134.465.270)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp185.549.000,-) sedangkan DKEL sebesar Rp46.680.000,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BABUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terdapat Transfer Masuk berupa Blangko Akta Cerai sebesar Rp.4.403.730,- berdasarkan BAST Transfer Keluar Barang Persediaan dari PTA Semarang Nomor : W11-A/2477/PL.09/VI/2023 tanggal 21 September 2023 sebanyak 30 Blangko Akta Cerai yang diterima sepanjang tahun 2023 dengan harga satuan Rp 146.791,-

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.403.730,- dan Rp4.732.900,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan Semester II dan Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan disajikan pada laporan keuangan Semester II.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Kudus adalah:

1. Rekening Bendahara pengeluaran pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Kudus A/C 653194009741000 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400974 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-. Surat ijin penerbitan persetujuan kembali rekening virtual oleh Kepala KPPN Kudus Nomor 000032 tanggal 30 April 2022, setelah rekening giro yang sebelumnya di tutup sesuai dengan tahapan restrukturisasi rekening Pemerintah mengikuti PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
2. BANK BRI A/C 0038-01-001839-30-2 a.n. RPL 129 PDT PA KUDUS UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara Pengadilan Agama Kudus dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 32.118.500,-.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Biaya Perkara yaitu sebesar Rp. 32.118.500,-
2. Biaya Konsinyasi yaitu sebesar Rp.0,-
3. Biaya Eksekusi yaitu sebesar Rp.0,-

F.2.5. Revisi DIPA

Terdapat revisi DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.400974/2023 tanggal 30 November 2022. Pada Triwulan III tahun 2023 terdapat 4 revisi, revisi 1 pada 15 Februari 2023 dan revisi ke-2 pada 4 April 2023, revisi ke 3 pada 6 juli 2023 dan revisi ke 4 pada 9 Oktober 2023 yaitu revisi pada halaman III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan DIPA dengan anggaran yang masih sama berjumlah sebesar Rp.46.680.000

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat perbaikan transaksi SPM,SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) DAN sspb.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Nomor W11-A16/26/KU.01/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengelola Penerimaan PNBP serta Staf Pengelola Keuangan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Penandatanganan SPM	:	Umardhani,SHI.
Bendahara Pengeluaran	:	Eren Gilang Permana, A.Md.
Staf Keuangan-Operator SAIBA / PPABP	:	Agus Fatchurrochim Thoyib.
Staf Keuangan-Operator SAIBA /SIMAK-BMN	:	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.

Pengadilan Agama Kudus
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2023	2023	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2023
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Agama Kudus

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
	NIHIL						
	Jumlah :						